

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- asep nursobah. (2022). *Perma 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana*. Mahkamah Agung. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>
- Asteriana Afiati. (2023). *KORBAN TINDAK PIDANA YANG DAPAT MENGAJUKAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI*. Jdih. <jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/korban-tindak-pidana-yang-dapat-mengajukan-restitusi-dan-kompensasi>
- Dan, O., & Restitusinya, H. A. K. (n.d.). 1 2 3 4.
- Di, S., Hukum, W., & Tangerang, P. (2024). *KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HAK ANAK*. 5(2), 17–34.
- Farhana, & Siregar, H. (2017). *Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Saat Inidan Peraturan Pendukungnya Mengenai Perdagangan Anakdi Indonesia*. Vol. 59.
- Feramarta, P. (2022). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS JUAL BELI BAYI YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG PADA STUDI KASUS PERKARA NOMOR: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021*.
- Government, M. (1997). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Modern at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, 00(1980), 3–41.
- humas. (2017). *PP Diteken, Kini Anak Korban Tindak Pidana Berhak Peroleh Restitusi*. <https://setkab.go.id/pp-diteken-kini-anak-korban-tindak-pidana-berhak-peroleh-restitusi/>
- Ibad, M., & Juli Nurani. (2023). *TINDAK PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR*. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 21–36. <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.153>
- jurnal j.* (n.d.).

- Kisworo, E. (2023). *ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE*.
- Kobandaha, M. (2017). Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Pengacara Praktek di Kota Kotamobagu 1 82. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), 82–91.
- Mathar, A. (2023). *SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*. 3.
- Mu. Aidil akbar. (2025). *Individu yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak yang sangat penting untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan pelaku*.
- Nafiatul Munawaroh, S. H. , M. H. (2023, September 29). *JERAT PANTI ASUHAN YANG MELAKUKAN EKSPLOITASI ANAK*. HUKUM ONLINE. hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-panti-asuhan-yang-melakukan-eksploitasi-anak-lt6516ba4818f88/
- Nomor, U. R. I., Perlindungan, T., Dan, S., Dengan, K., Tuhan, R., Maha, Y., Presiden, E. S. A., Indonesia, R., Saksi, P., Negara, U. D., Indonesia, R., Nomor, U., Pidana, H. A., Negara, L., Indonesia, R., Lembaran, T., Republik, N., Nomor, I., Persetujuan, D., ... Saksi, L. P. (2006). *Www.Antikorupsi.Org*. 1–43.
- Novrizaldi. (2020). *Kajian ASPIRE-IOM: Norma dan Stigma Sosial Berpengaruh pada Perdagangan Orang*. <https://www.kemenkopmk.go.id/kajian-aspire-iom-norma-dan-stigma-sosial-berpengaruh-pada-perdagangan-orang>
- Nugroho, A. P., Titahelu, J. A. S., & Latupeirissa, J. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Bacarita Law Journal*, 3(2), 92–102. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i2.8628>
- Nuraeni, N., & Kania, D. (2018). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 14(1), 131. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1866>
- pn sarolangun. (2025). *Hak Untuk Memperoleh Ganti Rugi dan Rehabilitasi Ganti Rugi*. <https://pn-sarolangun.go.id/index.php/layanan-hukum/hak-hak-pokok-masyarakat-pencari-keadilan/hak-ganti-rugi>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.

- Radjak, K. D., & Manti, N. (2023). Implementasi Pasal 76 Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Iblam Law Review*, 3(3), 146–160. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.189>
- Rahman Abdul, & Nurfaika Ishak. (2023). *KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI PRAKTIK EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK. Vol. XI.*
- Ramdani, R. (2020). Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Negara Dan Keadilan*, 9(1), 91. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7626>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo. *Bpk.Go.Id*, 3.
- Sepang, M., & Kermite, J. A. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN HAK RESTITUSINYA 1 Oleh : Falni Luthfiyyah Tontoigon 2.*
- SIMFONI PPA. (2023, July). *Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan.* KemenPPPA.
- Thenu, L. F., Alfaromona, J., Titahelu, S., & Latumaerissa, D. (2021). Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik (Studi Kasus di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) terhadap anak. *TATOHI: Jurnal Ilmu ...*, 1(6), 596–608.
- Tujuan, Bentuk, dan Proses Permohonan Restitusi. (2024). *Iblam Law Review*. <https://iblam.ac.id/2024/01/07/tujuan-bentuk-dan-proses-permohonan-restitusi/>
- Tumbel, A. S. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak.* <https://www.neliti.com/id/publications/3307/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-saksi-tindak-pidana-menurut-sistem-pera>
- UNODC. (2020). *PERDAGANGAN ORANG DI DUNIA.* Zero Human Trafficking Network.
- Velonia, B. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTAPALEMBANG.* repository.unsri.ac.id/75817/12/RAMA_74201_02011281823157_0003117704_0003128803_01_front_ref.pdf

- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>
- Yuliawan, B., & Bhakti, T. S. (2025). *Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual : Studi Kasus Putusan Nomor 112 / Pid . Sus / 2022 / PN . Bnr. 14*, 33–42. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>
- Wulandari, A., & Rahaditya, R. (2024). Analisis Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Seksual (Suatu Hal yang Utopis Dalam Penegakan Hukum di Indonesia). *RanahResearch*, 6(4), 1022–1029. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.923>
- Arifin, R.M., & Jaenuri, J. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KORPORASI SEBAGAI PELAKU. *AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.
- Panjaitan, J.S., Marlina, M., & Zulyadi, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*.
- Bui, U.A., Efendi, S., & Mandala, O.S. (2024). Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*.
- Hasin, A. (2020). PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA.

BUKU

- Hans Kelsen. (2019). *TEORI HUKUM MURNI DASAR-DASAR ILMU HUKUM NORMATIF* (Cetakan II). Nusa Media. google.co.id/books/edition/Teori_Hukum_Murni/dTRgEAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Undang-Undang baru untuk memperkuat Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional, pada Pasal 422 ayat (1) sampai Pasal 423 ayat (2) KUHP yang menjelaskan mengenai penjatuhan sanksi.

